

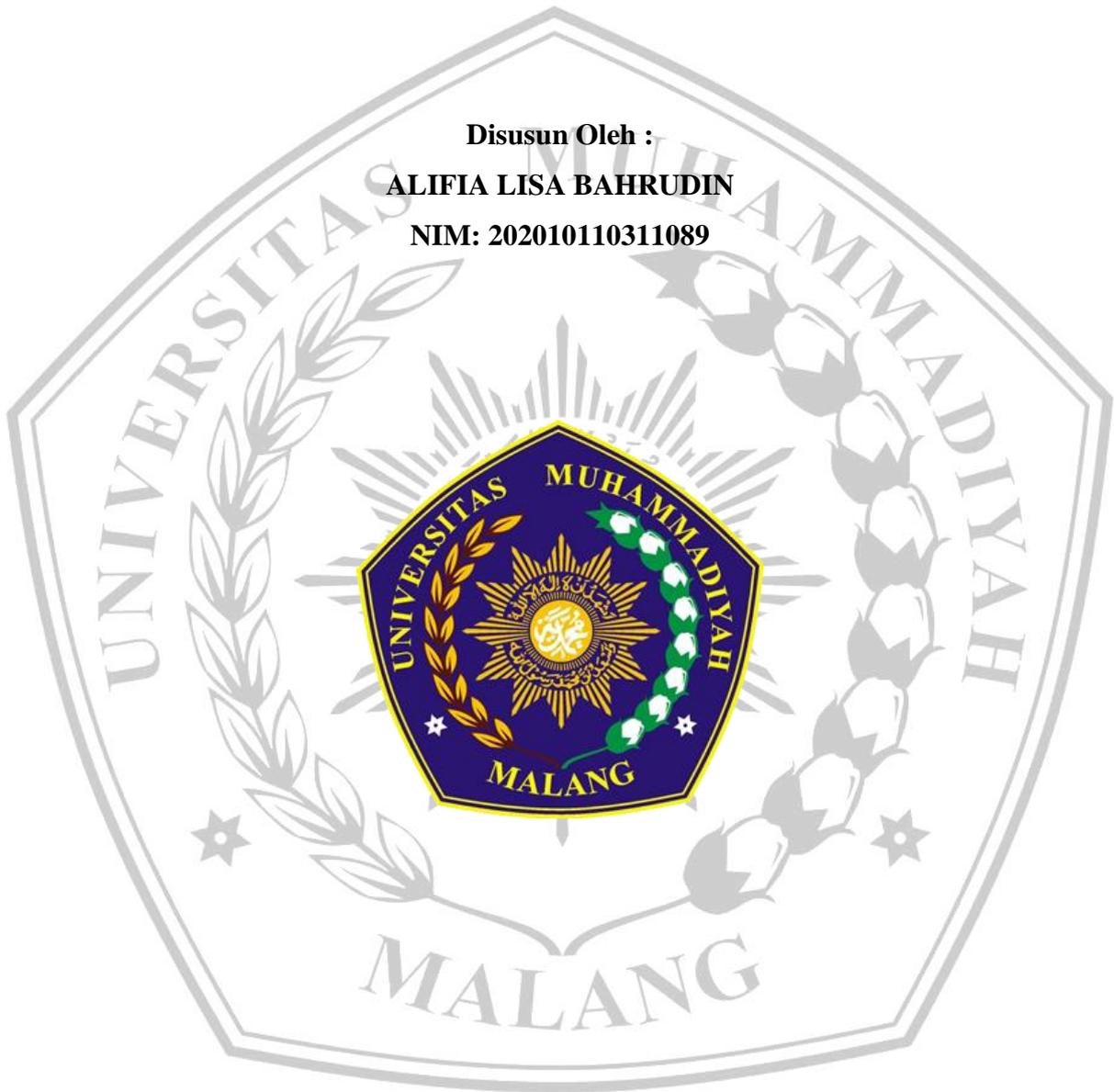
TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TIDAK MENDAPATKAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI MASYARAKAT YANG
TIDAK MENDAFTAR SEBAGAI PESERTA BPJS**

Disusun Oleh :

ALIFIA LISA BAHRUDIN

NIM: 202010110311089



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TIDAK MENDAPATKAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK
MENDAFTAR SEBAGAI PESERTA BPJS

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ALIFIA LISA BHRUDIN

NIM: 202010110311089

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TIDAK MENDAPATKAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK
MENDAFTAR SEBAGAI PESERTA BPJS**

Diajukan Oleh:

ALIFIA LISA BAHRUDIN

202010110311089

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Isdian Anggraeny, SH., MKn



Prof. Dr. Tugzal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALIFIA LISA BAHRUDIN

202010110311089

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

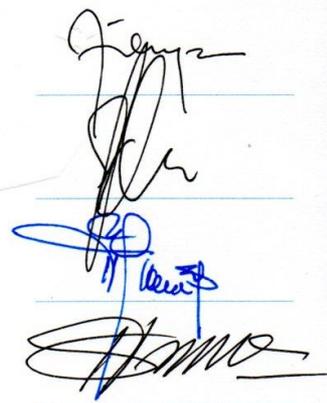
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Komariah SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Wasis, SH., M.Si., M.Hum



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALIFIA LISA BHRUDIN

NIM : 202010110311089

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENDAFTAR SEBAGAI PESERTA BPJS

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Maret 2024


Alfia Lisa Bahrudin

Ungkapan Pribadi :

*“Jadilah orang yang selalu tersebar kabar baik.
Sebarkan kedamaian dan kasih sayang,
karena dunia ini membutuhkannya”*



Motto :

*Masa lalu saya adalah milik saya,
masa lalu kamu adalah milik kamu,
tapi masa depan adalah milik kita.*

B. J. Habibie

ABSTRAKSI

Nama : Alifia Lisa Bahrudin
NIM : 202010110311089
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Masyarakat Yang Tidak Mendaftar Sebagai Peserta BPJS
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Timbulnya permasalahan terkait pemberian sanksi administratif dalam UU BPJS yang berupa sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dikenakan kepada setiap orang atau yang dimaksud masyarakat apabila tidak mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS, dinilai tidak memiliki kesesuaian dengan beberapa aspek yaitu mulai dari kewenangan BPJS, UUD 1945 dan UU Pelayanan Publik. Sehingga, adanya permasalahan tersebut penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis terkait bentuk sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang tercantum dalam UU BPJS dan pengaturan terkait sanksi tidak mendapatkannya pelayanan publik tertentu sudah sesuai dengan melihat dari kewenangan yang dimiliki oleh BPJS dan dengan tidak melanggar hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU Pelayanan Publik. Analisis yang dilakukan oleh Penulis yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa yang Pertama, bentuk dari sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik yang dikenakan kepada masyarakat tidak memiliki kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kedua, sanksi tersebut tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPJS sebagai badan hukum publik yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Bahkan, adanya sanksi tersebut dianggap telah bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait kewenangan yang dimiliki oleh instansi/pejabat yang berwenang dalam hal pengurusan/pemrosesan dokumen yang tercantum dalam sanksi tersebut yaitu IMB, SIM, Sertifikat Tanah, Paspor dan STNK. Selain itu, sanksi tersebut juga tidak memiliki kesesuaian dengan hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU Pelayanan Publik terkait hak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang layak dan berkualitas.

Kata Kunci : Sanksi, Pelayanan Publik, BPJS

ABSTRACT

Nama : Alifia Lisa Bahrudin
Nim : 202010110311089
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Masyarakat Yang Tidak Mendaftar Sebagai Peserta BPJS
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

The emergence of issues related to the imposition of administrative sanctions in the BPJS Law, in the form of sanctions of not receiving certain public services, applied to every individual or the community if they fail to register themselves and their family members as BPJS participants, is considered to be inconsistent with several aspects, namely starting from the authority of BPJS, the 1945 Constitution, and the Public Services Law. Therefore, with the existence of this problem, this research aims to analyze the form of sanctions of not receiving certain public services stipulated in the BPJS Law and the regulations related to the imposition of these sanctions, to see if they are appropriate considering the authority held by BPJS and without violating the rights of the people as citizens as stated in the 1945 Constitution and the Public Service Law. The analysis conducted by the Author uses the normative juridical research method. The results of this research indicate that, firstly, the form of the sanction of not receiving public services imposed on the community does not correspond to the principles of legislative formation, namely the principles of clarity of purpose, enforceability, and utility and effectiveness. Secondly, these sanctions is considered to be contradictory to various regulations governing the authority held by the relevant agencies/officers in the processing of documents listed in these sanctions, such as building permits, driver's licenses, land certificates, passports, and vehicle registration certificates. Moreover, these sanctions also do not correspond to the rights of the people as citizens as stipulated in the 1945 Constitution and the Public Service Law regarding the right to access decent and quality public services.

Keywords : Sanctions, Public Service, BPJS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Serta tidak lupa shalawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Atas berkah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Masyarakat Yang Tidak Mendaftar Sebagai Peserta BPJS” dengan diberi kemudahan dan kelancaran. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata-I pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Telah selesainya tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan kelancaran atas penyusunan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing pertama yang selalu memberikan ilmu dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing kedua yang selalu memberikan ilmu, arahan, semangat dan solusi kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak Nu'man Aunuh, S,H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa menjadi dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis kuliah dalam hal administrasi.
10. Terimakasih kepada Herlis Idayani selaku Ibu penulis yang selama ini selalu memberikan semangat, doa dan dukungan secara terus menerus, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu semoga dengan selesainya tugas akhir ini, dapat menjadi hadiah, kebahagiaan dan membalas atas jasa dan kasih sayang yang telah diberikan oleh Ibu kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Alm. Bahrudin selaku Ayah penulis, meskipun Ayah tidak dapat melihat pencapaian ini namun dengan tercapainya gelar sarjana ini akan tetap penulis persembahkan untuk Ayah karena atas doa semasa hidup Ayah, penulis dapat mencapai titik ini. Semoga Ayah bahagia disana, Aamiin.
12. Terimakasih kepada Kakak-Kakak penulis, Alfin Kusuma Dinata, Astrid Azizy dan Arizkyani Fahrulisa yang selalu memberikan dukungan, semangat dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Terimakasih kepada Andhika Rafli Refiandi yang selalu menemani dan memberikan semangat, dukungan dan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Terimakasih kepada Arvika Wulandari yang telah memberikan dukungan dan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan melewati proses panjang untuk pencapaian ini dan hingga akhirnya telah sampai pada titik hidup saat ini.

16. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Sehingga, penulis sangat terbuka atas kritik dan saran yang dapat memperbaiki tugas akhir ini. Penulis berharap adanya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Malang, 26 Februari 2024

Alifia Lisa Bahrudin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penelitian Terdahulu	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	10
2. Bahan Hukum	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Metode Analisis Bahan Hukum	13
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Tentang Teori Keadilan	15
B. Kajian Tentang Teori Kewenangan	16
C. Kajian Tentang Sanksi	18
1. Pengertian Sanksi	18
2. Macam-Macam Sanksi	19
D. Kajian Tentang Sanksi Administratif	20
E. Kajian Tentang Pelayanan Publik	22
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	22
2. Jenis-jenis Pelayanan Publik	23
3. Penyelenggara Pelayanan Publik	25
4. Penerima Pelayanan Publik	27
F. Kajian Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	29
1. Ruang lingkup BPJS	29
2. Kewenangan BPJS	29

3. Sanksi Administratif dalam UU BPJS	31
G. Kajian Tentang Asas Pembentukan Peraturan	
Perundang - Undangan	31
1. Asas Kejelasan Tujuan	31
2. Asas Dapat Dilaksanakan	31
3. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan	32
H. Kajian Tentang Hak Masyarakat Mendapatkan Fasilitas	
Pelayanan yang Layak dalam UUD 1945	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Bentuk Sanksi Tidak Mendapatkan Layanan Publik	
Tertentu dalam UU BPJS Ditinjau dari Perspektif Keadilan	34
B. Kesesuaian Pengaturan Sanksi Tidak Mendapatkan Layanan	
Publik Tertentu dalam UU BPJS	41
1. Sanksi Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu	
dalam UU BPJS Dilihat Dari Kewenangan yang	
Dimiliki BPJS	41
2. Sanksi Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu	
dalam UU BPJS Dilihat Dari UUD 1945 dan UU	
Pelayanan Publik Terkait Hak yang Dimiliki Masyarakat ...	47
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	6
--------------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA	63
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan	65
Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi	67



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atok, A Rosyid Al. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral.* Setara Press, 2015.
- Muhaimin, Dr. "SH., M. Hum, 2020, 'Metode Penelitian Hukum.'" Mataram University Press: Mataram, n.d.
- Remaja, I, and Nyoman Gede. "Hukum Administrasi Negara." *Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti*, 2017.
- Sahya, Anggara. "Hukum Administrasi Negara." *CV Pustaka, Bandung*, 2018.
- Setiawan, Yudhi. "Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik," 2019.
- Simorangkir, J C T. "Kamus Hukum JCT Simorangkir." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2000.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, and Winardi. "Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi." *Malang: Setara Press*, 2012.
- Solikin, Nur. "PENGATAR METODELOGI PENELITIAN HUKUM." *CV. PENERBIT QIARA MEDIA*, 2021.

JURNAL

- Agustina, Enny. "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat." *Jurnal Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019): 10.
- Andrika, Ahmad, Ibrahim Ahmad, and Arifin Tumuhulawa. "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerajaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023): 72–84.
- Cahyandari, Dewi. "Kajian Yuridis Pelimpahan Kewenangan Monopoli Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial." *Legal Spirit* 1, no. 2 (2018).
- Endah, Kiki. "Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2018): 141–51.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.

- Harefa, Oinike Natalia. “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr.” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47.
- Hasyim, Moh, and Nurmalita Ayuningtyas Harahap. “Legalitas Pengaturan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023): 245–266.
- Moendoeng, Nathania Griseldis Kirsten. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945.” *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2019).
- Nuriyanto, Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep ‘Welfare State’?” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 428–453.
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro.” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018).
- Raharja, I F. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.” *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>.
- Setiadi, Wicipto. “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 603–614.
- Situngkir, Danel Aditia. “MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14.
- Surajiyo, Surajiyo. “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila.” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2018): 21–29.
- Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–142.
- Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023): 43–61.

WEBSITE

Permatasari, Erizka. “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif.” *Hukum Online*, 2021.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif/>.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Alifia Lisa Bahrudin

Nim : 202010110311089

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Masyarakat Yang Tidak Mendaftar Sebagai Peserta BPJS”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Februari 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum